

KOLABORASI MULTIAKTOR DALAM PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN DI PROVINSI LAMPUNG

Nicholas Syahputra Hutahaean

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung

Ketahanan pangan merupakan isu strategis pembangunan nasional, terutama di pedesaan yang rentan kemiskinan dan keterbatasan akses. FAO (1996) mendefinisikannya sebagai kondisi ketika setiap individu memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi, definisi yang diadopsi dalam UU No. 18 Tahun 2012 sebagai tanggung jawab bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pangan dipandang bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga hak asasi manusia yang wajib dipenuhi secara berkelanjutan. Meskipun Indonesia berpotensi besar sebagai negara agraris, distribusi dan akses pangan masih belum merata. Untuk menjawab persoalan ini, pemerintah meluncurkan Program Desa Mandiri Pangan (Demapan) pada 2006, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat desa melalui ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Berbasis paradigma partisipatif, program ini terbukti berhasil menjangkau ribuan desa, melibatkan jutaan rumah tangga, menekan kerawanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Darwis, 2016).

Program Demapan dilaksanakan melalui tiga tahap: persiapan (pemetaan desa rawan pangan, identifikasi rumah tangga sasaran, pembentukan kelembagaan desa), penumbuhan (bantuan modal, pelatihan kewirausahaan, pendampingan teknis), dan pengembangan (penguatan kelembagaan ekonomi desa, diversifikasi usaha, integrasi pasar). Desain bertahap ini sejalan dengan RPJMN yang menekankan pemberdayaan masyarakat desa, sekaligus relevan dianalisis melalui perspektif *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), yang menegaskan keberhasilan program publik sangat ditentukan oleh kemampuan aktor-aktor terlibat dalam membangun forum bersama, berbagi sumber daya, dan mengambil keputusan berbasis konsensus. Implementasi Program Demapan menunjukkan capaian yang beragam antarwilayah. Di beberapa desa, program ini mampu meningkatkan kemandirian pangan, pendapatan rumah tangga, dan menurunkan angka kemiskinan. Namun, di desa lain pelaksanaannya terkendala oleh kelembagaan yang lemah, partisipasi masyarakat yang rendah,

serta tingginya ketergantungan pada bantuan. Hambatan semakin nyata dengan minimnya keterlibatan sektor swasta, padahal kolaborasi multiaktor sangat diperlukan untuk memperkuat akses pasar, memperlancar distribusi, dan mendorong investasi lokal.

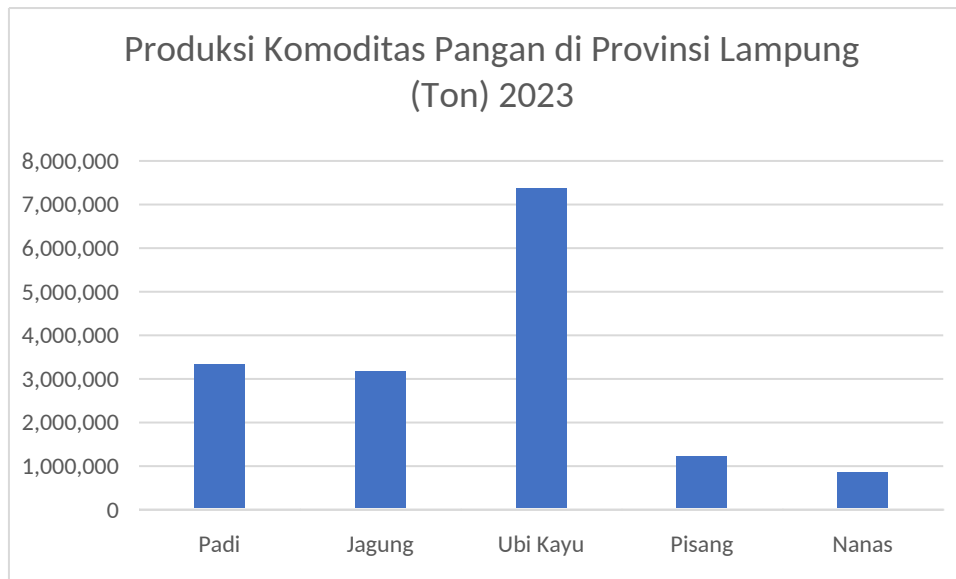
Tabel 1. 1 Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, 2019-2024

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	Provinsi Lampung	71.36	77.43	77.96	78.61	81.56	82.58
1	Lampung Barat	74.62	70.80	70.80	74.34	75.39	76.18
2	Tanggamus	76.55	74.67	75.34	73.60	74.19	76.40
3	Lampung Selatan	78.99	79.23	79.66	81.81	85.46	84.64
4	Lampung Timur	77.38	79.50	81.20	82.78	83.55	85.22
5	Lampung Tengah	78.88	79.83	80.16	81.07	84.55	84.93
6	Lampung Utara	71.35	71.51	73.00	75.00	74.94	76.82
7	Way Kanan	72.37	73.34	74.96	78.34	79.31	79.61
8	Tulang Bawang	82.29	82.83	84.58	86.25	87.51	88.78
9	Pesawaran	76.74	80.15	78.96	77.86	77.89	80.85
10	Pringsewu	83.13	83.79	84.05	84.14	87.38	87.35
11	Mesuji	81.78	83.66	85.60	85.62	86.21	88.18
12	Tulang Bawang Barat	79.28	77.58	78.58	79.84	83.59	83.74
13	Pesisir Barat	71.98	72.93	71.60	71.71	76.32	75.77
14	Bandar Lampung	73.49	71.62	74.17	73.41	83.37	84.64
15	Metro	78.00	76.75	76.74	73.35	83.66	85.78

Sumber: Lampung Satu Data, 2025

Berdasarkan data tahun 2019–2024, kondisi Provinsi Lampung secara umum menunjukkan tren positif dengan peningkatan skor dari 71,36 pada tahun 2019 menjadi 82,58 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi secara konsisten di tingkat provinsi. Namun, perkembangan antar kabupaten/kota memperlihatkan dinamika yang berbeda. Kabupaten Tulang Bawang menempati posisi tertinggi dengan nilai yang terus meningkat dari 82,29 pada 2019 hingga 88,78 pada 2024, menunjukkan kinerja terbaik dan pertumbuhan yang stabil. Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur juga mengalami peningkatan cukup signifikan, masing-masing naik sekitar 5,65 poin dan 7,84 poin dari tahun 2019 ke tahun 2024, sehingga keduanya dapat dikategorikan sebagai daerah dengan perkembangan pesat. Sementara itu, Lampung Tengah, Way Kanan, Pesawaran, dan Lampung Utara menunjukkan peningkatan moderat, meskipun Lampung Utara tetap berada pada kategori rendah dengan capaian 76,82 pada 2024. Di sisi lain, Tanggamus dan Lampung Barat terlihat stagnan, bahkan Tanggamus cenderung mengalami sedikit penurunan dari 76,55 pada 2019 menjadi 76,4 pada 2024, sedangkan Lampung Barat hanya naik tipis dari 74,62 menjadi 76,18. Dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa meskipun Provinsi Lampung secara keseluruhan mengalami perkembangan positif, masih terdapat kesenjangan antarwilayah, di

mana sebagian daerah mengalami peningkatan signifikan, sementara sebagian lainnya cenderung stagnan.



Gambar 1. 1 Produksi Komoditas Pangan di Lampung, 2023

Sumber: Data Ringkasan oleh Peneliti dari Profil Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023

Berdasarkan data pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa produksi komoditas pangan unggulan Lampung tahun 2022 yang didominasi oleh ubi kayu (7,37 juta ton), padi (3,33 juta ton), jagung (3,18 juta ton), pisang (1,22 juta ton), dan nanas (861 ribu ton) menunjukkan potensi besar provinsi ini sebagai lumbung pangan nasional. Namun, capaian produksi tinggi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemandirian pangan di tingkat desa. Hal ini menegaskan pentingnya kolaborasi multi aktor dalam program Desa Mandiri Pangan, di mana pemerintah berperan dalam regulasi dan fasilitasi, masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam produksi dan konsumsi, sektor swasta mendukung melalui investasi dan akses pasar, serta lembaga swadaya masyarakat dan akademisi memberikan pendampingan, inovasi, serta edukasi. Tanpa sinergi lintas aktor ini, ketimpangan antara desa dengan produksi tinggi dan desa yang masih bergantung pada bantuan eksternal akan terus terjadi. Oleh karena itu, integrasi produksi dengan penguatan kelembagaan desa melalui kolaborasi multi aktor menjadi kunci agar Lampung tidak hanya dikenal sebagai penghasil pangan nasional, tetapi juga sebagai provinsi dengan desa-desa yang benar-benar mandiri dan berdaya tahan pangan secara berkelanjutan.

Dalam perspektif collaborative governance, capaian dan disparitas tersebut dapat dijelaskan melalui kualitas kolaborasi multiaktor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi yang efektif membutuhkan *trust* (kepercayaan antaraktor),

communication (komunikasi yang intensif dan terbuka), serta *shared understanding* (kesamaan tujuan). Di desa-desa yang berhasil mandiri pangan, kehadiran pemerintah sebagai fasilitator, keterlibatan masyarakat dalam produksi pangan pokok, serta dukungan swasta yang konsisten terhadap sektor pertanian lokal mampu menciptakan sinergi positif. Sebaliknya, di wilayah yang masih tertinggal, seringkali terjadi keterputusan koordinasi, lemahnya kapasitas kelembagaan desa, dan minimnya minat sektor swasta untuk berinvestasi pada pangan pokok sehingga kemandirian pangan sulit tercapai. Oleh karena itu, memperkuat tata kelola kolaboratif menjadi kunci agar keberhasilan tidak hanya terpusat di beberapa desa, tetapi merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Lampung.

Tabel 1. 2 Jumlah Desa Mandiri Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung Barat	2	10	40	47	51	63
Tanggamus	0	0	0	0	2	11
Lampung Selatan	0	0	0	0	2	20
Lampung Timur	0	0	0	4	13	43
Lampung Tengah	0	0	3	16	30	48
Lampung Utara	0	0	0	0	0	5
Way Kanan	0	0	1	10	26	46
Tulang Bawang	0	1	1	4	4	17
Pesawaran	3	6	7	10	11	28
Pringsewu	1	3	6	12	19	36
Mesuji	0	0	0	0	9	16
Tulang Bawang Barat	0	0	1	1	11	18
Pesisir Barat	0	1	1	1	3	9
Jumlah	6	21	60	105	181	360

Sumber: Lampung Satu Data, 2025

Data diatas merupakan data pertumbuhan Desa Mandiri di Provinsi Lampung dari tahun 2019 hingga 2024 tidak terlepas dari peran kolaborasi multi-aktor dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan (Demapan). Data menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dari hanya 6 desa mandiri pada 2019 menjadi 360 desa pada 2024. Lonjakan besar terjadi setelah 2021, sejalan dengan semakin kuatnya sinergi pemerintah daerah serta lembaga pendukung desa dalam menggerakkan program kemandirian. Kabupaten Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur menjadi contoh daerah yang berhasil mendorong peningkatan jumlah desa mandiri secara cepat, berkat dukungan lintas aktor seperti pemerintah daerah yang menyediakan regulasi dan anggaran, lembaga keuangan yang memberi

akses permodalan, serta kelompok masyarakat desa yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan potensi lokal.

Sebaliknya, daerah seperti Lampung Utara dan Pesisir Barat yang pertumbuhannya relatif lambat menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi antaraktor, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan Demapan tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah semata, tetapi juga keterlibatan sektor swasta, LSM, akademisi, serta komunitas lokal. Dengan demikian, kolaborasi multi-aktor terbukti menjadi kunci akselerasi desa mandiri pangan di Lampung, sekaligus memperlihatkan bahwa semakin kuat jaringan kerja antar pihak, semakin besar pula dampak pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

Selain itu, tantangan juga muncul dari sisi keberlanjutan pengelolaan pangan berbasis potensi lokal. Banyak desa masih bergantung pada bantuan eksternal dan kesulitan mandiri setelah intervensi pemerintah berakhir. Tingkat partisipasi masyarakat pun tidak merata; ada yang aktif dalam kelompok tani dan kelembagaan desa, namun sebagian lainnya cenderung pasif karena keterbatasan pemahaman, waktu, maupun insentif ekonomi. Sejalan dengan temuan Indriastuti et al. (2023), keberhasilan tata kelola kolaboratif dalam program pangan sangat bergantung pada kualitas partisipasi masyarakat dan adaptasi kelembagaan terhadap kondisi lokal.

Oleh karena itu, permasalahan yang muncul bukan sekadar apakah Demapan mampu meningkatkan ketahanan pangan desa, melainkan terletak pada bagaimana kolaborasi multiaktor dijalankan, bagaimana kebijakan dipahami oleh para aktor, serta bagaimana dinamika interaksi sosial terbentuk di tengah perbedaan kepentingan dan kapasitas. Inilah ruang penting bagi penelitian kualitatif karena melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang proses, makna, dan dinamika kolaborasi, strategi kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dapat dirumuskan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan di tingkat desa, khususnya di Provinsi Lampung.

Urgensi penelitian tentang kolaborasi multiaktor dalam Program Desa Mandiri Pangan (Demapan) di Provinsi Lampung sangat signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, mengingat ketahanan pangan merupakan pilar pembangunan nasional sekaligus amanat konstitusi. Program ini memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Permendes No. 22 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Desa dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin ketersediaan, distribusi, serta konsumsi pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian Demapan tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga menelaah bagaimana mandat kebijakan

nasional diartikulasikan dan diadaptasi di tingkat lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Dari sisi empiris, kualitas kolaborasi antaraktor menjadi penentu utama keberhasilan. Pemerintah, aparat desa, kelompok tani, BUMDes, lembaga keuangan lokal, hingga sektor swasta kerap hadir dengan kepentingan dan kapasitas yang berbeda. Teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008) menekankan pentingnya membangun kepercayaan, komunikasi yang intensif, serta pengambilan keputusan berbasis konsensus sebagai prasyarat kolaborasi yang efektif. Variasi capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Lampung 2019–2024 yang menunjukkan kemajuan seperti di kabupaten Tulang Bawang dan Mesuji sekaligus ketertinggalan di Lampung Barat dan Pesisir Barat, menjadi bukti empiris bahwa ketidakmerataan capaian program erat kaitannya dengan dinamika koordinasi lintas aktor.

Secara praktis, penelitian ini mendesak untuk memberikan evaluasi serta rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah maupun pusat. Hasilnya diharapkan mampu memperkuat kelembagaan desa, memperbaiki mekanisme koordinasi, dan merancang forum kolaborasi yang lebih inklusif. Pada level nasional, temuan penelitian dapat dijadikan dasar kebijakan yang adaptif dengan menyeimbangkan regulasi formal, kebutuhan lokal, serta keterlibatan sektor swasta. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan teori akademik, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata dalam perumusan kebijakan publik yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan di tingkat desa.

Penelitian ini diarahkan untuk memahami dinamika kolaborasi multiaktor dalam implementasi Program Desa Mandiri Pangan (Demapan) di Provinsi Lampung. Fokusnya tidak hanya menilai keberhasilan atau kegagalan program, tetapi juga menggali bagaimana interaksi antaraktor terbentuk, dijalankan, dan dipersepsikan. Penelitian ini mencakup identifikasi bentuk kolaborasi antara pemerintah, desa, kelompok tani, BUMDes, LKD, TPD, lembaga adat, LSM, penyuluh, hingga sektor swasta, serta keterkaitannya dengan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008).

Selain itu, penelitian ini menganalisis faktor pendukung dan penghambat, mulai dari regulasi, dukungan kebijakan, peran masyarakat, kekuatan kelembagaan desa, hingga kendala koordinasi, perbedaan kepentingan, keterbatasan kapasitas, minimnya partisipasi swasta, dan hambatan geografis. Implikasi kolaborasi multiaktor terhadap keberlanjutan program juga ditelaah, termasuk kemandirian desa dalam pengelolaan pangan lokal, penguatan kelembagaan ekonomi, kesinambungan kegiatan, serta kemitraan dengan sektor swasta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi praktis bagi strategi kebijakan yang adaptif dan

berkelanjutan, sekaligus memperkaya kajian teoretis mengenai tata kelola kolaboratif dalam program ketahanan pangan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aziza, T. N. (2019). Upaya Penguatan Kelembagaan Pangan. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 3(1), 204–217. <https://jepa.ub.ac.id/index.php/jepa/article/view/159>
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung. *Profil Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023*. Diakses dari <https://bappeda.lampungprov.go.id/download/buku-profil-provinsi-lampung>
- Brouwer, H., Woodhill, J., Hemmati, M., Verhoosel, K., & Van Vugt, S. (2015). *The MSP guide: How to design and facilitate multi-stakeholder partnerships*. Centre for Development Innovation, Wageningen UR.
- Darwis, V. (2016). *Dampak program Desa Mandiri Pangan terhadap Ketahanan Pangan dan Kemiskinan*. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. <https://repository.pertanian.go.id/items/515c1258-0438-4492-a4ee-1e028d16ded1>
- Dewi, K. S., Hariyoko, Y., & Ismail, H. (2025). Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Urban Farming di Surabaya. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(3), 01–16. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Presidensial/article/view/936>
- Ediwyati, R., Koestiono, D., & Setiawan, B. (2016). ANALISIS KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PADA PELAKSANAAN PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN DI DESA ORO BULU KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN). *Agricultural Socio-Economics Journal*, 15(2), 85. <https://agrise.ub.ac.id/index.php/agrise/article/view/165>
- Food and Agriculture Organization. (1996). *Rome Declaration on World Food Security and*

World Food Summit Plan of Action. Rome: FAO

- Garvera, R. R., Arifin, F. S., & Fazrilah, A. N. (2021). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA (Studi di Desa Bojongmengger, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 502-513. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/6603>
- Gitosaputro, S., & Irawan, S. A. (2024). Kontribusi Program Kostratani dalam Meningkatkan Produktivitas Padi untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung. *Jurnal Penyuluhan*, 20(02), 323-336. <https://doi.org/10.25015/20202450846>
- Indriastuti, D., Priluddina, M., Rusmana, R. B., & Yuliyanto, T. (2023). Tata Kelola Kolaboratif Program Ketahanan Pangan di Kodim 0733 Kota Semarang. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4613-4629. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i6.2960>
- Iriani, A., Putra Prabujaya, S., Zubaidah, S., & Endasari, E. (2025). Pendekatan Thinking Across dalam Dynamic Governance: Strategi Efektif untuk Mewujudkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(1), 20–41. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.4687>
- Marhaeti, M., Rosada, I., & Ilsan, M. (2022). Efektivitas program Desa Mandiri Pangan dalam peningkatan pendapatan petani di Kabupaten Barru. *Wiratani: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 5(1), 22-31. <https://doi.org/10.33096/wiratani.v5i1.82>
- Mudatsir, R., & Asriyanti Syarif. (2023). Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Galung Tropika*, 12(2), 262–272. <https://doi.org/10.31850/jgt.v12i2.1112>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016.
- Rikardus, E. (2025). Penguatan Kebijakan Ketahanan Pangan: Sinergi Multi-Pemangku Kepentingan dalam Peningkatan Produksi Padi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 302–315. <https://indojurnal.com/index.php/jisoh/article/view/338>
- Runi Arrang, Sutrisno Sutrisno, & Sigit Wahyudi. (2024). Implementation Of Food Security Policy In A Network Governance Perspective. *International Journal of Social Welfare and Family Law*, 1(4), 39–57. <https://doi.org/10.62951/ijsw.v1i4.68>

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012.

Sumber Lain:

Antara News Lampung. (2017). Lampung miliki 97 Desa Mandiri Pangan. Diakses pada <https://lampung.antaranews.com/berita/297811/lampung-miliki-97-desa-mandiri-pangan>

Lampung Satu Data. (2025). Indeks ketahanan pangan (IKP) Provinsi Lampung 2019–2024. Diakses pada <https://opendata.lampungprov.go.id/dataset/indeks-ketahanan-pangan-ikp-provinsi-lampung>

Lampung Satu Data. (2025). Jumlah Desa Mandiri Tahun 2019–2024. Diakses pada <https://opendata.lampungprov.go.id/dataset/jumlah-desa-mandiri-tahun-2019-2024>